

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG PENDIDIKAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI RIAU**

Christin Natalia Silaban¹⁾, H. Harlen²⁾, Lapeti Sari²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : christinnataliasilaban79@gmail.com

*Analysis of the Influence of Poor Population, Government Spending in Health and
Education in the Human Development Index in Riau Province*

ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of factors of the number of poor people, government spending in health and education in the human development index in Riau Province. This study uses secondary data in the form of annual time series data from 2010-2018. The analytical method used is multiple linear regression, statistical testing includes the *f* test, *t* test, and *R* square (coefficient of determination), as well as the classic assumption test that is normality, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity with the help of SPSS 24.0. From the results of this study it was found that the variable number of poor people, government spending in health and education simultaneously had a significant effect on the human development index in Riau Province. While partially the number of poor population (*X*₁) in this study significantly influenced the human development index. For government expenditure variables in health (*X*₂) and education (*X*₃) no significant effect on the human development index. The magnitude of influence caused (*R*²) by these three variables together to the dependent variable is 60.4% while the remaining 39.6% is influenced by other variables not included in this study.*

Keywords: Human Development Index, Government Spending in Health and Education

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus-menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembangunan menjadi hal yang sangat penting terutama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks pembangunan manusia diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Bukan hanya karena letak geografisnya yang berada di jalur lintas pulau Sumatera, namun juga

angka pertumbuhan ekonominya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti dengan tingginya kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Hal itu dapat terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk Riau setiap tahunnya dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami peningkatan selama 9 tahun terakhir dihitung mulai dari tahun 2010 sebesar 68.65% dan terus meningkat sampai tahun 2018 mencapai 72.44%. Adapun IPM terendah terletak di Kepulauan Meranti yaitu pada tahun 2010 sebesar 59.71% hingga tahun 2018 sebesar 65.23%. IPM tertinggi terletak di Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2010 sebesar 77.34% hingga tahun 2018 sebesar 80.66%. Dengan demikian nilai peningkatan produktivitas pemberdayaan manusia setiap tahunnya selalu meningkat.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Menurut Adelfina (2016), banyaknya jumlah penduduk miskin dapat mengakibatkan masalah atau efek cukup serius yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan di negara manapun, karena pada dasarnya masalah banyaknya penduduk miskin adalah kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Jumlah penduduk miskin yang terus meningkat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, namun jika jumlah penduduk miskin disuatu negara semakin menurun maka akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi

menjadi baik. Bagi penduduk miskin peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara memberikan keterampilan dan menumbuhkan sikap produktif dalam mendorong semangat kemandirian bersama agar dapat terlepas dari kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Persentase jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2010 sebesar 4.20% hingga ke tahun 2018 menurun menjadi 2.85%. Sedangkan persentase jumlah miskin tertinggi berada di Kepulauan Meranti yaitu pada tahun 2010 sebesar 42.57% hingga tahun 2018 menjadi sebesar 27.79%.

Tinggi rendahnya IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu perangkat yang banyak digunakan untuk mewujudkan pembangunan adalah melalui kebijakan fiskal. Salah satu instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah pengalokasian dana atau anggaran pembangunan yang merupakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dll. Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. persentase pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terendah di Provinsi Riau pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,68% dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,42%. Sedangkan persentase pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terendah di Provinsi Riau pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,21% dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 16,67%. Data tersebut menerangkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah pada APBD setiap tahunnya di bidang pendidikan dan kesehatan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan keinginan untuk peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau? 2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau? 3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. 2) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. 3) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan Manusia di Riau. 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan Penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2009).

Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut *World Bank* (2004) merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari.

Pengeluaran Pemerintah

Dalam studi ekonomi pembangunan mempelajari bahwa dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan tersedianya barang publik. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2009).

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut (Achsana dalam Rica Amanda, 2010) :

1. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi
2. Eksternalitas
3. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik.
4. *Rate of return* pendidikan

Penelitian Terdahulu

Baeti (2013), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia serta variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini adalah Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data tahun 2010-2018. Tujuan menggunakan data tersebut adalah agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *time series* dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dipilih adalah data jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang bersumber dari laporan

Badan Pusat Statistik (BPS) Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Riau dan informasi lain yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini juga diambil dari berbagai jurnal dan buku teks.

Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Beberapa variabel digunakan dalam penelitian ini, meliputi variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia serta variabel independen yaitu jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen (Y)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (BPS, 2017). Dimana data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Periode 2010-2018 kurun waktu 9 tahun.

Jumlah penduduk miskin sebagai variabel independen (X1)

Jumlah Penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tergolong miskin dan tinggal di wilayah tertentu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan menurut BPS (2018), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data jumlah penduduk

miskin yang digunakan dari BPS Riau dari tahun 2010-2018 Kabupaten/Kota di Riau.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebagai variabel independen (X2)

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Perioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebagai variabel independen (X3)

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas seseorang dengan menambah tingkat pengetahuan akan hal tertentu baik bidang akademik atau non akademik. Pemerintah sebagai paratur yang berkewajiban dalam menyediakan barang publik berupa kebutuhan dasar seperti pelayanan pendidikan. Seperti halnya yang telah diatur dalam undang-undang tentang pendidikan. Data variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang digunakan pada tingkat Provinsi Riau Tahun 2010-2018 yang dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah (Rp).

Teknik Analisis Data

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan program SPSS. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan model uji statistik linear berganda. Uji statistik linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan linear antara dua atau lebih variabel melalui metode regresi. Regresi

linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas atau independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) dengan variabel terikat atau dependen (Y). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini jumlah penduduk miskin (X_1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2), dan bidang pendidikan (X_3) dengan variabel terikatnya dalam hal indeks pembangunan manusia (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu hubungan fungsional. Adapun formulasi persamaan regresi berganda menurut Sugiyono (2014:277) yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Indeks pembangunan manusia (%)

X_1 = Jumlah penduduk miskin (%)

X_2 = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (%)

X_3 = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (%)

b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

a = Konstanta

e = Variabel pengganggu (*Error term*)

Uji Asumsi Klasik

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bisa atau bahkan menyesatkan, maka perlu digunakan uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogrov Smirnov* untuk

mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *Kolmogrov Smirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinieritas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu). Beberapa yang sering digunakan adalah uji *durbin watson*, uji dengan *run test* dan jika data observasi diatas 100 data sebaiknya menggunakan uji *lagrange Multiplier*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi yang muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah Residual (Y prediksi - Y sesungguhnya)

Uji Statistik

a. Uji Simultan (uji F)

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

Ho : $b_1 = 0$... (tidak ada pengaruh)

Ha : $b_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika F-hitung < F-tabel maka H0 diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 = K - 1}{1 - (R^2) = (n - K)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah sampel

b. Uji Parsial (uji t)

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel

independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan perumusan bentuk hipotesis sebagai berikut.

Ho : $b_i = b$

H1 : $b_i \neq b$

Dimana b_i adalah koefisien variabel independen ke I nilai parameter hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menyelidiki berapa besarnya persentase kontribusi variabel bebas (jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (indeks pembangunan manusia) digunakan uji koefisien determinasi linear berganda (R^2). Semakin besar nilai koefisien penentu berganda mendekati 1 maka semakin tepat suatu garis linear sebagai suatu pendekatan hasil penelitian. Dan keragaman total dalam variabel terikat dapat dijelaskan atau diterapkan oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model persamaan regresi.

HASIL PENELITIAN

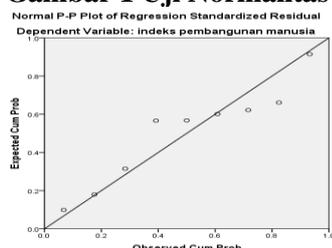
Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linear berganda harus bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya empat asumsi dasar yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik model regresi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas residual dapat dilihat dari grafik normal *p*-plot. Apabila pancaran titik atau data residual berada disekitar garis lurus melintang atau diagonal, maka dikatakan residual mengikuti distribusi normal.

Gambar 1 Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2020

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa sebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Artinya bahwa data atau residul dalam regresi linear berganda ini sudah berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*. Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 90%. Nilai *tolerance value* untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,10 sedangkan apabila nilai VIF nya kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Coefficients ^a | Collinearity Statistics | |
|-------|--|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | jumlah penduduk miskin | 0.886 | 1.129 |
| | pengeluaran pemerintah bidang kesehatan | 0.685 | 1.46 |
| | pengeluaran pemerintah bidang pendidikan | 0.653 | 1.532 |

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 1 didapat nilai *tolerance value* yang lebih besar dari 0,10 yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 0,886 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 0,685 dan bidang pendidikan sebesar 0,653. Sedangkan untuk nilai VIF masing-masing variabel dari penelitian ini dibawah 10 yaitu jumlah penduduk miskin 1,129 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 1,460 dan bidang pendidikan 1,532. Dimana semua nilai VIF dari setiap variabel dibawah 10 dan nilai *tolerance value* lebih lebih besar dari 0,10 maka dapat diketahui bahwa antara variabel-variabel independen tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji multikolinearitas sehingga dapat dimasukkan dalam pengujian model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus melihat nilai uji Durbin Watson.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan melihat Durbin-Watson, secara umum nilai Durbin-Watson yang bisa diambil patokan menurut (Santoso, 2002) adalah :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif

Tabel 2 Hasil Uji Durbin-Watson

| Model | Model Summary ^b | | | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .777 ^a | .604 | .366 | 1.05422 | 1.527 |

a. Predictors: (Constant), bidang pendidikan, jumlah penduduk miskin , pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

b. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,527 yang terletak antara $2 - 2 = -2 < 1,527 < +2$. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Dapat juga dibuktikan dalam uji runs test seperti tabel dibawah ini

Tabel 3 Hasil Uji Runs Test

| Runs Test | | Unstandardized Residual |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Test Value ^a | | .17993 |
| Cases < Test Value | | 4 |
| Cases >= Test Value | | 5 |
| Total Cases | | 9 |
| Number of Runs | | 6 |
| Z | | .040 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .968 |

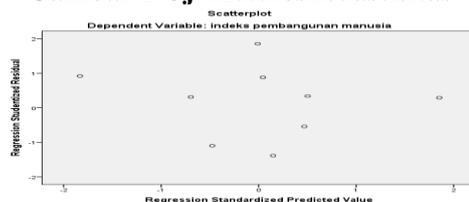
a. Median

Sebagai dasar pengambilan keputusan uji runs test yaitu jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi dan sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dapat dilihat dari tabel runs test diatas bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,968 lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terjadi gangguan gejala autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dilakukan dengan mengamati gambar *scatter plot*. Apabila titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit pada gambar *scatter plot*), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan gambar 2 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa analisis yang disertai pembahasan terhadap hasil analisis regresi antara faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau dari jumlah penduduk miskin (X_1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) dan bidang pendidikan (X_3) sebagai variabel independen dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen.

Model ekonometrika dari penelitian ini dianalisis menggunakan program SPSS dan model regresi linear berganda. Data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini merupakan hasil regresi yang akan digunakan untuk pengujian data secara lebih lanjut.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan program computer SPSS (*Statistical Package Social Science*) yaitu program statistik untuk ilmu sosial maka diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau

| Model | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-------|
| | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | Standardized Coefficients Beta | | |
| (Constant) | 81.213 | 4.438 | | 18.302 | 0 |
| jumlah penduduk miskin | -1.423 | 0.54 | -0.788 | -2.634 | 0.046 |
| pengeluaran pemerintah bidang kesehatan | -0.021 | 0.1 | -0.071 | -0.208 | 0.844 |
| pengeluaran pemerintah bidang pendidikan | 0.107 | 0.09 | 0.412 | 1.183 | 0.29 |

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas, diperoleh variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 81,213 - 1,423X_1 - 0,021X_2 + 0,107X_3 + e$$

Untuk melihat model persamaan regresi tersebut sesuai dengan aturan statistik maka harus dilakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap uji asumsi klasik model regresi. Adapun arti dari angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah :

- Nilai konstanta = 81,213 yang artinya jika semua variabel independen dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau akan tetap sebesar 81,213.
- Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk miskin (X1) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -1,423. Artinya bahwa ketika variabel lain tetap maka setiap adanya kenaikan tingkat jumlah penduduk miskin sebesar 10% maka akan mampu menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 14,23%.
- Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,021. Artinya bahwa ketika variabel lain tetap maka setiap adanya kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 10% maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,21%.
- Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X3) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,107. Artinya bahwa ketika variabel lain tetap maka setiap adanya kenaikan pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan sebesar 10% maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 1,07%.

Pengujian Statistik

1) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, sebaliknya mendekati angka satu besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 5 Hasil Uji Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .777 ^a | .604 | .366 | 1.05422 |

a. Predictors: (Constant), bidang pendidikan, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan
b. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan, 2020

Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,604. Artinya adalah bahwa persentase pengaruh variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia adalah sebesar 60,4%. Sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dengan model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak. Dalam pengujian ini penulis merumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

H0 : Jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

H1 : Jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom* (df) atau dikenal dengan df2 dan juga dalam F tabel disimbolkan dengan N2. Hal ini ditentukan dengan rumus : $df1 = k - 1$

$$df2 = n - k$$

Dimana n = Banyaknya observasi dalam kurun waktu data

k = Banyaknya variabel (bebas dan terikat)

Dalam pengujian ini dilakukan pada signifikan 5% atau 0,05. Jika dimasukkan rumus maka pada $df1 = 4 - 1 = 3$ dan pada $df2 = 9 - 4 = 5$, maka nilai F tabel adalah 5,41.

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 8.474 | 3 | 2.825 | 2.541 | .170 ^b |
| | Residual | 5.557 | 5 | 1.111 | | |
| | Total | 14.030 | 8 | | | |

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

b. Predictors: (Constant), bidang pendidikan, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan demikian diketahui bahwa $F_{hitung} (2,541) > F_{tabel} (5,41)$ dengan signifikansi $(0,000) < 0,05$. Artinya adalah bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan konstan, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$)

$H0 : b_i = 0$ artinya, suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H0 : b_i \neq 0$ artinya, variabel independennya merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$)

$$\begin{aligned} t\text{-tabel} &= n-k-1 : \alpha/2 \\ &= 9-3-1 : 0,05/2 \\ &= 5 : 0,025 \\ &= 2,571 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah data

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

| Model | | Coefficients ^a | | t | Sig. | |
|-------|--|-------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | | | Standardized Coefficients Beta |
| | (Constant) | 81.213 | 4.438 | | 18.302 | 0 |
| 1 | jumlah penduduk miskin | -1.423 | 0.54 | -0.788 | -2.634 | 0.046 |
| | pengeluaran pemerintah bidang kesehatan | -0.021 | 0.1 | -0.071 | -0.208 | 0.844 |
| | pengeluaran pemerintah bidang pendidikan | 0.107 | 0.09 | 0.412 | 1.183 | 0.29 |

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa :

1. Pengujian terhadap variabel jumlah penduduk miskin (X_1) dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,634 pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,046. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-2,634 < 2,571$) dan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari α ($0,046 < 0,05$). Maka artinya secara parsial jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

2. Pengujian terhadap variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,208 pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,844. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-0,208 < 2,571$) dan nilai probabilitas (sig) lebih besar dari α ($0,844 > 0,05$). Maka artinya secara parsial pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.
3. Pengujian terhadap variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_3) dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,183 pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,290. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($1,183 < 2,571$) dan nilai probabilitas (sig) lebih besar dari α ($0,290 > 0,05$). Maka artinya secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia berarti terjadi hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki variabel Jumlah Penduduk Miskin adalah sebesar -1,423. Jadi apabila Jumlah Penduduk Miskin mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 1,423%. Dan sebaliknya

jika jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1,423%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2018), dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016” dimana hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan secara individu terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan menurun dan sebaliknya, hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk miskin meningkat maka masyarakat akan semakin terpuruk tidak bisa memenuhi kesejahteraannya seperti pendidikan, mendapatkan pekerjaan, kesehatan, dan akan berdampak pada menurunnya indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Hal ini sesuai dengan teori dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Astri (2013) dan Septiana (2015), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2003), bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan

untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Pengeluaran Pemerintah pada sektor kesehatan, undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015). Perbandingan dana pada sektor pendidikan yang lebih kecil akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia karena kecilnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang ada di Provinsi Riau. Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena sedikitnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan di Provinsi Riau untuk dinas kesehatan, untuk turun langsung, untuk meningkatkan fasilitas perlengkapan dan peralatan kesehatan supaya tingkat indeks pembangunan manusia Provinsi Riau dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar. Berdasarkan hasil secara parsial bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang memiliki nilai standar koefisien -0,021.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Berdasarkan nilai koefisien yang

dimiliki variabel bidang pendidikan adalah sebesar 0,107. Dari nilai tersebut dikatakan lebih besar dari tingkat alfa 5% atau 0.05 yang artinya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,107%.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2015) yang berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”. Dimana bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2009. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Besarnya nilai koefisien variabel adalah 0,0042 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan menaikkan IPM sebesar 0,0042. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel ini masih sangat kecil, meskipun sudah terdapat sebagian kabupaten/kota mengalokasikan dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBD ternyata tidak serta merta memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap IPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab I sampai dengan Bab V mengenai analisis pengaruh jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau periode 2010-2018 penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Artinya bahwa terjadi hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Apabila jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan turun dan sebaliknya jika jumlah penduduk miskin mengalami penurunan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Artinya dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.
3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Artinya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan maka indeks pembangunan manusia akan meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin melalui program-program jaring pengaman sosial juga menjadi suatu keharusan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau harus lebih memperhatikan alokasi dan realisasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Karena setelah melihat besarnya koefisien masing-masing variabel tersebut ternyata hanya berpengaruh kecil terhadap IPM. Realisasi anggaran tersebut

dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan seperti pemberian BOS, Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan pemberian ASKESKIN atau program pemberian kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Rica, 2010. Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak (studi kasus 14 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2008). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Asri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara H, 2013. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia. *Jurnal pendidikan ekonomi dan bisnis*. Vol. 1 no. 1, 77-102.
- Baeti N, 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*.
- BAPPEDA, 2019. *Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan*, BAPPEDA Provinsi Riau, Pekanbaru.
- BPS, 2017. *Indeks Pembangunan Manusia*, Badan Pusat Statistik Riau.

- BPS, 2018. *Indeks Pembangunan Manusia*, Badan Pusat Statistik Riau
- Elfindri, Dr. Prof. dan Nasri Bachtiar. Phd, 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang : Andalas University Press
- Maryani, Tri, 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Ritonga, Hamonangan, 2003. *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan pusat Statistik.
- Rizky, Tutur, 2018. *Skripsi : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Septiana. M, Vekie. A, & Hanly F, 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal, Vol. 15, NO. 2, 7 (15)*
- Sukirno, Sadono, 2009. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi ketiga, Rajawali Pers, Jakarta
- Todaro, M. P, 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi, Jilid I, Edisi ke Sembilan*, Erlangga, Jakarta